

KOMUNIKASI KONSEP KEDAULATAN PANGAN DALAM JARINGAN ADVOKASI TRANSNASIONAL

Annisa Utami Seminar & Sarwititi Sarwoprasodjo

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, IPB University, Bogor, Indonesia

e-mail: seminar-annisa@apps.ipb.ac.id

Abstrak

La Via Campesina (LVC), sebuah gerakan agraria transnasional, telah aktif terlibat dalam mempromosikan kedaulatan pangan sebagai alternatif dari krisis pangan global. Untuk menyebarkan gerakan kedaulatan pangan, komunikasi antara anggota LVC lokal, nasional, dan global sangat diperlukan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji praktik komunikasi Serikat Petani Indonesia (SPI), sebuah organisasi gerakan sosial tani asal Indonesia yang merupakan anggota LVC, dalam mengkomunikasikan konsep kedaulatan pangan kepada seluruh anggotanya. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan data primer berasal dari pertemuan-pertemuan, seperti konferensi atau diskusi publik yang diselenggarakan atau dihadiri oleh anggota SPI dan LVC. Pengumpulan data dari wawancara mendalam dengan anggota SPI dan LVC juga dilakukan sebagai data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa teks, video, dan rekaman yang dihasilkan oleh LVC juga digunakan untuk memperkaya hasil penelitian ini. Dengan menggunakan etnografi komunikasi sebagai metode dalam pengumpulan data, penulis menemukan bagaimana LVC mendefinisikan, merundingkan, dan mempertahankan makna kedaulatan pangan, yaitu: 1) setiap tingkatan memiliki fungsi dan kerangkanya sendiri dalam mengkomunikasikan kedaulatan pangan; 2) mengkomunikasikan posisi atau sikap terhadap isu-isu pertanian di LVC dianggap penting agar anggota dapat memahami makna kedaulatan pangan dalam kehidupan mereka; dan 3) isu-isu dari semua tingkatan terwakili dengan baik dalam teks-teks yang diproduksi oleh LVC.

Kata kunci: *etnografi komunikasi, kedaulatan pangan, organisasi petani, jaringan transnasional*

COMMUNICATING FOOD SOVEREIGNTY AS A CONCEPT WITHIN TRANSNATIONAL ADVOCACY NETWORK

Abstract

La Via Campesina (LVC), a transnational agrarian movement, has been actively engaged in promoting food sovereignty as an alternative to the global food crisis. To spread the food sovereignty movement, communication between local, national, and global members of LVC is crucially needed. This article focused in examining communication practices of Serikat Petani Indonesia (SPI), a peasant social movement organization from Indonesia, as the member of LVC. Qualitative method is used for this research, where the primary data are meetings, such as conferences or public discussion, and also gathering data from in-depth interview with LVC members. Secondary data such as texts, video, and recording produced by LVC are also used to enrich the result of this research. Using ethnography of communication as a method in collecting data, the author found how SPI, as a member of LVC, defining, negotiating, and maintaining the meaning of food sovereignty. There are three findings for this research, which are: 1) each level has its own function and frame in communicating food sovereignty; 2) communicating position or stance on agricultural issues in LVC is deemed important so the member could embrace the meaning of food sovereignty in their lives; and 3) issues from all levels are well represented in texts produced by LVC.

Keywords: *ethnography communication, food sovereignty, peasant organization, transnational advocacy network*

PENDAHULUAN

Kedaulatan pangan adalah pendekatan alternatif terhadap sistem pangan saat ini, yaitu ketahanan pangan, dalam menghadapi krisis pangan global (McMichael, 2014). Kedaulatan pangan menekankan petani sebagai aktor utama yang berpartisipasi dalam pembangunan sistem pangan baik secara nasional maupun internasional sehingga dapat menguntungkan dan memberdayakan petani (Edelman, 2014). Kedaulatan pangan bercita-cita untuk mengembalikan sistem pangan dan pertanian pada level domestik dengan memberikan kemerdekaan pada petani lokal untuk memproduksi pangan yang merefleksikan pengetahuan dan pengalamannya pada situasi lingkungan lokalnya (Koochafkan & Altieri, 2011). LVC telah mempromosikan kedaulatan pangan melalui jaringannya yang meliputi 164 organisasi petani lokal dan nasional dari 73 negara dari wilayah Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika (LVC, 2009).

Kedaulatan pangan, melalui LVC sebagai jaringan advokasi transnasional petani, telah berjelajah melalui ruang dan waktu sehingga makna dari kedaulatan pangan itu sendiri menjadi beragam. Konteks organisasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi komunikasi dalam JATrans, misalnya perbedaan derajat kekuasaan, otonomi, serta kapasitas para anggotanya dalam mengkomunikasikan kedaulatan pangan (Borras, 2010). Hal ini menunjukkan seberapa merdekanya suatu anggota JATrans dalam menyuarakan, mempertahankan, dan memperjuangkan kedaulatan pangan pada tingkat lokal, nasional, maupun global.

Salah satu kapasitas komunikasi JATrans adalah mengawinkan konsep kedaulatan pangan dengan isu-isu lain, seperti isu kedaulatan pangan dengan hak asasi manusia (Claeys, 2012), lingkungan dan agraria (McKeon, 2013; Peluso, Afiff, & Rachman, 2008; Pye, 2010), gender (Brochner,

2014). Kemampuan ini sangat berkaitan dengan ilmu komunikasi karena adanya usaha penceritaan ulang ide kedaulatan pangan dalam kerangka isu-isu yang dipilih oleh JATrans. Penelitian-penelitian ini menyatakan bahwa perkawinan isu dapat membuat konsep kedaulatan pangan semakin beresonansi dengan publik dan mempengaruhi keberhasilan kampanye JATrans.

Penelitian lainnya dari Lerche (2008) dan Swerts (2013) justru mengungkapkan kontradiksi. Mengawinkan isu atau memperluas ruang lingkup suatu konsep transnasional justru akan mendepolitisasi aksi JATrans atau melemahkan tujuan dari JATrans itu sendiri. Hal ini bisa terjadi ketika JATrans justru memilih beraliansi dengan organisasi non pemerintah yang memiliki ideologi yang berbeda. Perbedaan ideologi antara anggota JATrans memperlihatkan bahwa ada suatu konteks yang lebih luas yang mempengaruhi interaksi di dalam JATrans.

Sistem internasional turut mempengaruhi interaksi JATrans, seperti misalnya perbedaan ideologi (Doherty & Doyle, 2006), sejarah (Baletti, Johnson, & Wolford, 2008), dan budaya (Boyer, 2010) antar negara. Perbedaan-perbedaan ini akan mempengaruhi bagaimana kedaulatan pangan dikerangkakan pada suatu negara dengan sistem politik serta budaya tertentu, sehingga akan muncul penyesuaian-penyesuaian agar ide kedaulatan pangan dapat diterima dan digunakan oleh anggota JATrans dan juga diterima oleh publik.

Untuk mengatasi perbedaan-perbedaan antara anggota JATrans menurut Andrews (2010a; 2010b) dan Binnie dan Klesse (2012) adalah melalui adanya partisipasi yang terbuka serta dialog antara anggota JATrans untuk membangun kembali makna hubungan mereka sehingga relasi kuasa di dalam JATrans dapat diatasi. Agar terjadi dialog di dalam JATrans, temuan Shawki (2013) mengungkapkan bahwa kombinasi komunikasi interpersonal dan media massa diperlukan. Fominaya (2010) juga

menekankan partisipasi, komunikasi tatap muka, pembangunan emosi, pemanfaatan jaringan informal, serta pelaksanaan dialog yang dihadiri oleh anggota yang sama sebagai kunci dalam pembangunan solidaritas dalam JATrans. Dunford (2014) di lain pihak menyatakan bahwa untuk mampu membangun solidaritas dalam JATrans dan dapat mencapai terjadinya perubahan sosial, JATrans harus mampu membangun ruang komunikatifnya sendiri agar dialog terjadi. Hasil-hasil penelitian ini bagaimanapun tidak menyentuh siapa anggota dari JATrans dan latar belakang apa yang mempengaruhi komunikasi mereka dalam JATrans.

Penelitian Levitt dan Merry (2009) menggunakan pendekatan '*vernacularization*' atau proses penterjemahan yang sesuai dengan bahasa suatu komunitas dalam menjelaskan bagaimana hak asasi perempuan dapat digunakan pada level lokal. Pendekatan ini paling dekat dalam menjelaskan fenomena komunikasi yang melintasi batas-batas negara dalam mendifusikan suatu isu global kepada masyarakat lokal. Keberhasilan *vernacularization* dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu posisi sosial dari pembawa isu global, *framing* yang dilakukan oleh pembawa isu global, sejarah, budaya, serta *power* yang menaungi sebuah wilayah, nasional maupun lokal. Penelitian ini masih menunjukkan dilema, dimana sebuah isu perlu memiliki nilai-nilai universal sehingga dapat beresonansi dengan publik namun disaat yang sama nilai-nilai universal justru berlawanan dengan apa yang dialami pada level lokal. Penelitian ini memperlihatkan bagaimana pertimbangan mengenai penerimaan masyarakat lokal perlu dipikirkan oleh JATrans.

Penelitian Caouette (2007) mengungkapkan JATrans seringkali tidak menyertakan partisipasi langsung masyarakat lokal agar konsep yang dibawa oleh JATrans bisa diterima oleh masyarakat lokal. Penelitian Lindell (2009) dan Friedman (2009) menunjukkan bahwa partisipasi langsung aktor

lokal dalam proses komunikasi anggota JATrans, mampu membuat aktor lokal dapat menggunakan prinsip kedaulatan pangan dalam aksi-aksi lokalnya. Di sisi lain, kedua penelitian ini juga menyatakan ketika masyarakat lokal tidak mampu menginisiasi isu-isu lokal maka akan muncul ketergantungan antara masyarakat lokal terhadap JATrans.

Studi dari penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa dalam penjelajahan konsep kedaulatan pangan akan dipengaruhi oleh, *pertama*, resonansi terhadap isu global, nasional, maupun lokal. Aktivitas JATrans lebih banyak diakses oleh pelaku pada tingkat global dan nasional, sehingga partisipasi mereka dalam membangun resonansi akan lebih mudah. Sebaliknya, agar kedaulatan pangan dapat beresonansi diperlukan partisipasi langsung masyarakat lokal. Tanpa adanya partisipasi dari masyarakat lokal, sulit bagi kedaulatan pangan bisa beresonansi dengan isu lokal. Hal ini menunjukkan faktor yang *kedua* dalam komunikasi JATrans yaitu partisipasi masyarakat lokal. *Ketiga*, struktur organisasi dari anggota JATrans menjadi faktor yang menentukan kemampuan para anggotanya dalam melahirkan resonansi kedaulatan pangan serta partisipasi anggotanya.

Kesimpulan-kesimpulan di atas, belum menjelaskan proses komunikasi dalam JATrans. Dari temuan-temuan ini, peneliti berusaha mengisi celah untuk menjelaskan bagaimana komunikasi di dalam JAT terjadi dalam rangka membangun *masterframe* (makna bersama) kedaulatan pangan, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan praktik komunikasi di dalam JAT dalam mendefinisikan, menegosiasi, dan mempertahankan *masterframe* kedaulatan pangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus (Yin, 2003) untuk mengungkapkan interaksi dan

komunikasi manusia dan menjelaskan mengapa manusia berinteraksi dan berkomunikasi dengan cara tersebut (Creswell, 2009). Etnografi komunikasi dipilih sebagai metode dalam mengambil data. Etnografi komunikasi adalah sebuah metode untuk melihat proses komunikasi dan interaksi antar aktor-aktor dengan asumsi bahwa komunikasi dan interaksi tidak lahir dalam ruang hampa, tetapi bergantung pada konteks atau kasus tertentu (Hymes, 1967, 1972). Fokus dari etnografi komunikasi adalah *speech community*, yaitu bagaimana komunikasi dalam suatu lingkungan terpola dan terorganisir sebagai sistem-sistem peristiwa komunikasi (Saville-Troike, 2008).

Model ‘SPEAKING’ (Hymes, 1967) digunakan sebagai panduan dalam mengambil data. Model ‘SPEAKING’ terdiri dari beberapa konsep, yaitu *settings* adalah gambaran mengenai situasi dan kondisi fisik saat peristiwa komunikasi berlangsung; *participant* adalah deskripsi partisipan yang hadir dalam peristiwa komunikasi, seperti asal, jabatan, dan hubungan-hubungan di antara partisipan tersebut; *ends* adalah tujuan dari peristiwa komunikasi serta tujuan dari partisipan yang terlibat; *act sequence* adalah urutan peristiwa bagaimana komunikasi dilakukan dan topik apa saja yang dibicarakan; *key* adalah nada atau sikap saat komunikasi terjadi; *instrumentalization* adalah bentuk atau gaya komunikasi, seperti lisan atau tertulis; *norm* adalah norma yang berlaku dalam peristiwa komunikasi; dan *genre* adalah bentuk

komunikasi yang dilakukan, misalnya diskusi atau ceramah.

Dalam etnografi komunikasi, observasi dan wawancara menjadi teknik utama dalam mengambil data karena unit utama dalam etnografi komunikasi adalah peristiwa komunikasi. Observasi dilakukan saat pertemuan-pertemuan organisasi terjadi, misalnya diskusi publik, rapat, atau konferensi. Wawancara, dalam metode etnografi komunikasi, dilakukan untuk mendalami atau mengklarifikasi hasil observasi kepada para partisipan yang terlibat dalam peristiwa komunikasi.

Dalam menentukan peristiwa komunikasi yang harus diobservasi, peneliti menggunakan pendekatan multi-lokasi atau multi-situs (Marcus, 1995). Dengan menggunakan strategi ini, lokasi penelitian ditentukan berdasarkan pertemuan yang ada dan kemudian peneliti memilih informan dari para peserta yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Observasi dan wawancara dilakukan di beberapa tempat, yaitu di Bogor, Jakarta, dan Yogyakarta (tabel 1). Penelitian dilakukan dari tahun 2016-2017, namun tidak berarti penelitian dilakukan secara terus menerus. Untuk di Bogor observasi dilakukan selama dua minggu dan di Yogyakarta selama tujuh hari, yang kemudian dilanjutkan dengan wawancara lanjutan baik secara tatap muka ataupun melalui telpon. Dari lima pertemuan yang diobservasi oleh peneliti, dipilih 16 anggota level lokal dan dua anggota level nasional sebagai informan dalam wawancara semi terstruktur.

Tabel 1. Daftar peristiwa komunikasi yang diteliti (2016-2017)

Level	Deskripsi Peristiwa Komunikasi	Lokasi	Teknik Pengumpulan Data
Lokal	Pelatihan Pertanian Alami	Sleman, DIY	Data sekunder
Nasional	Rapat Persiapan Konferensi Perkebunan Rakyat Rapat Persiapan Konferensi Agroekologi di	Jakarta	Data primer

Srilanka

Diskusi Publik dan Musyawarah Nasional

BAMUSTANI

Konferensi Perkebunan Rakyat

	Konferensi Internasional ke-7 La Via Campesina	Spanyol	Data sekunder
Global	Field Trip Jaringan Organisasi Tani Global	Sleman, DIY	Data primer

Setelah mengumpulkan data, peneliti melakukan pengkodean dengan menggunakan QSR NVivo Pro 11, sebuah perangkat lunak untuk menganalisis penelitian kualitatif (Richards, 1999). Tahap pengkodean pertama dilakukan dengan menggunakan model 'SPEAKING', tahap pengkodean kedua dilakukan dengan menggunakan *descriptive, in vivo, process, evaluation, emotion, dan values coding* (Miles, Huberman, & Saldana, 2014), dan tahap ketiga adalah mengkode dengan menggunakan konsep-konsep dari teori yang digunakan. Setelah pengkodean selesai, *mind map* disusun sebagai acuan dalam menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengenal La Via Campesina dan Serikat Petani Indonesia

Ada beberapa hal yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum menjelaskan praktik komunikasi dalam LVC. LVC adalah sebuah organisasi petani dunia yang anggotanya berasal dari 73 negara dari berbagai benua, yaitu Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika, dengan total anggota sebagai 164 organisasi lokal. Di Indonesia, Serikat Petani Indonesia (SPI) adalah organisasi anggota LVC yang telah bergabung dari tahun 1996 (Purwanto, 2012).

Struktur organisasi dalam SPI adalah sebagai berikut: *pertama*, Dewan Pengurus Basis (DPB) yang merupakan pengurus pada tingkat desa; *kedua*, Dewan Pengurus Cabang (DPC) yang merupakan pengurus pada tingkat kabupaten; *ketiga*, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) yang merupakan pengurus pada tingkat propinsi. DPW dan DPC adalah pengurus-

pengurus yang dipilih dari DPB, sehingga dalam penelitian ini DPB, DPC, dan DPW disebut sebagai level lokal untuk memudahkan kategorisasi kasus dalam penelitian.

Wewenang organisasi paling tinggi dipegang oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang merupakan pimpinan tertinggi SPI di tingkat pusat yang kantornya berlokasi di Jakarta. Level nasional yang disebut dalam penelitian ini merujuk pada pertemuan-pertemuan yang diinisiasi oleh DPP dan bisa saja dihadiri oleh berbagai anggota level lokal. Untuk level global didefinisikan sebagai pengurus LVC dan/atau pertemuan-pertemuan lokal dan/atau nasional yang dihadiri oleh pengurus LVC. LVC sendiri menganut struktur desentralisasi (tidak ada ketua, yang ada hanya koordinator umum yang dipilih oleh anggota LVC) yang dibagi menurut wilayah, yaitu Amerika, Afrika, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Asia Timur, dan Eropa dimana setiap wilayah memiliki dua perwakilan (laki-laki dan perempuan) untuk pengambilan keputusan, yang kemudian agenda-agenda diturunkan kepada level regional, nasional, dan lokal melalui pertemuan-pertemuan yang dihelat oleh LVC dan SPI. LVC sendiri tidak menyeragamkan bentuk atau struktur organisasi dari anggota organisasi lokal, sehingga setiap organisasi lokal akan memiliki kekhasan yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya.

Praktik Komunikasi Level Lokal

Pertemuan pada level lokal yang diobservasi oleh peneliti adalah pelatihan pertanian alami yang diadakan oleh SPI pada level lokal. Peserta dan pembicara dari pertemuan ini tidak hanya dibatasi pada anggota SPI saja, tetapi khalayak umum. Dengan target

khalayak non anggota SPI, maka pertemuan lokal ini juga dimaksudkan untuk menjaring anggota.

Pemahaman yang disebarkan oleh anggota SPI dalam pelatihan ini adalah bagaimana menjadi petani mandiri dengan melakukan pertanian alami. Cara berkomunikasi dengan pesan seperti ini adalah cara yang paling mudah untuk diterima kelompok-kelompok tani. Bagaimana cara SPI mengkomunikasikan konsep petani mandiri? Pertama adalah melalui penjelasan konsep *on-off farming*, dimana pertanian tidak hanya berfokus pada mengolah lahan saja tetapi juga memikirkan seluruh proses bertani dari pembuatan pupuk kompos, penyemaian benih mandiri, pembuatan nutrisi, pembuatan pestisida hayati, sampai bagaimana menjual produk mereka. Tentu saja akan sulit bagi petani untuk mengerjakan *on-off farming* seorang diri, sehingga pelatihan ini bermaksud untuk mencari orang-orang yang sekiranya bisa berperan pada salah satu proses dalam *on-off farming*. Inilah mengapa peserta dari pertemuan ini tidak hanya tertutup pada petani saja, tetapi bagi siapapun yang ingin mempraktikkan pertanian alami. Selama observasi dilakukan, peneliti bertemu dengan peternak yang membuat pupuk dari kotoran sapi dan juga cacing, ada yang berperan menjadi pengumpul hasil produksi para petani organik untuk di jual ke pasar. Peran lainnya adalah pencari pasar.

Cara kedua adalah melalui skema pra-koperasi yang dibangun oleh anggota SPI. Tidak ada konsep jual-beli dalam pra-koperasi, sehingga bagi mereka yang tertarik membeli pupuk atau nutrisi akan diajak untuk menjadi anggota pra-koperasi dan kemudian diajari bagaimana membuat input pertanian secara mandiri, tanpa harus bergantung pada pihak lain. Begitu pula dengan bibit, anggota SPI mempromosikan penggunaan bibit lokal dengan cara meminjamkan bibit –bukan menjual– yang kemudian harus dikembalikan kepada anggota SPI. Dapat dilihat bahwa anggota SPI walau fokus pada praktik pertanian alami, mampu

menyampaikan pesan-pesan petani mandiri melalui medium input pertanian.

Fungsi dari pertemuan level lokal adalah: (1) menjaring anggota baru dan (2) mempromosikan praktik pertanian alami. Berkaitan dengan konsep *masterframes* kedaulatan pangan yang dilihat dalam penelitian ini, maka *frame* kedaulatan pangan pada level lokal adalah menjadi petani mandiri melalui pertanian alami.

Praktik Komunikasi Level Nasional

Pada level nasional, ada dua bentuk pertemuan: *pertama*, pertemuan nasional yang hanya dihadiri oleh anggota SPI saja, biasanya untuk persiapan bagi para anggota lokal, sebagai delegasi SPI, dalam pertemuan publik atau pertemuan global. Pertemuan jenis ini disebut sebagai pertemuan internal. *Kedua*, pertemuan dengan tujuan membuat deklarasi yang tidak hanya melibatkan anggota SPI saja, tetapi juga dari organisasi tani lain, LSM, dan pemerintah. Pertemuan jenis ini peneliti sebut sebagai pertemuan publik.

Tujuan dari pertemuan internal adalah mempersiapkan para anggota lokal sebagai delegasi pada pertemuan publik atau pertemuan global. Dalam pertemuan internal, para anggota lokal akan diberikan waktu untuk menceritakan masalah pertanian serta aksi-aksi yang telah dilakukan di daerahnya masing-masing. Pengurus nasional dalam pertemuan ini memiliki peran lain, yaitu menggali kegiatan-kegiatan anggota lokal di masing-masing daerah sebagai bukti pencapaian organisasi.

Diskusi dalam pertemuan internal lebih santai karena dihadiri oleh sesama anggota lokal dan pengurus pada level nasional yang memberi kebebasan bagi para anggota lokal untuk berdiskusi. Apabila ada anggota-anggota yang memiliki pandangan yang berbeda, maka anggota lain akan mengingatkan atau menghibahkan bahwa pandangan tersebut tidak sesuai dengan pandangan SPI. Contohnya, salah seorang anggota lokal mengevaluasi bahwa bahwa inti plasma adalah kebijakan yang baik,

namun anggota lokal lainnya menyatakan bahwa inti plasma justru tidak mensejahterakan petani dan menjelaskan bahwa perdebatan tentang inti plasma di SPI sudah selesai. Artinya, SPI secara jelas menolak inti plasma. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pertemuan internal pesan yang disampaikan adalah posisi atau sikap SPI dalam kedaulatan pangan. Pesan ini bisa disampaikan oleh anggota lokal ataupun pengurus organisasi, hanya saja pengurus organisasi memiliki bentuk pesan yang berbeda.

Pengurus organisasi dalam pertemuan internal akan memberikan himbauan-himbauan kepada anggota lokal. Himbauannya berupa: (1) bentuk kerjasama yang diinisiasi oleh perusahaan atau badan pemerintah dengan petani yang dilihat SPI semakin merugikan petani dan (2) perusahaan-perusahaan input pertanian yang namanya mungkin belum diketahui para petani lokal dan sering menjual input pertanian langsung ke petani lokal. Himbauan ini semakin mengukuhkan pandangan pada level lokal bahwa petani harus mandiri.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pertemuan internal berfungsi sebagai arena untuk: (1) mengumpulkan aksi yang telah dilakukan pada level lokal sebagai barang bukti pencapaian organisasi ataupun untuk keperluan advokasi; (2) menyampaikan posisi atau sikap SPI terhadap masalah-masalah pertanian; (3) menyesuaikan pandangan para petani anggota lokal dengan pandangan SPI. Artinya, *frame* kedaulatan pangan pada pertemuan internal adalah fokus pada pandangan dan SPI pada anggota dalam mencapai kedaulatan pangan yang berakar dari cara-cara yang berbeda dengan kebijakan pemerintah ataupun apa yang dilakukan perusahaan.

Pada pertemuan publik, SPI berusaha mempertemukan berbagai *stakeholders* dengan petani, yaitu pemerintah dan ornop. Hal ini dimaksudkan agar petani dan *stakeholders* lainnya bisa mendapatkan banyak sudut pandang dalam memahami pertanian. Pada level ini, anggota lokal yang terlibat dalam

pertemuan seringkali menuntut pada pemerintah untuk berpihak pada petani kecil dibandingkan perusahaan. Suara-suara mereka tidak hanya terbatas pada praktik pertanian yang alami, seperti apa yang terjadi pada level lokal. Anggota SPI secara jelas membedakan praktik pertanian mereka dan pandangan mereka dengan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun perusahaan, misalnya mengkontraskan revolusi hijau dengan pertanian alami.

Tujuan utama dari pertemuan publik adalah membuat deklarasi/resolusi. Ada satu kegiatan yang khas dalam pertemuan publik yaitu sidang komisi kecil yang formatnya seperti *focused group discussion*. Dalam sesi ini, para petani akan berdiskusi mengenai suatu topik yang sudah ditentukan oleh panitia dan berusaha membangun definisi terkait topik tersebut. Pada kegiatan ini, anggota lokal berusaha mengkomunikasikan pandangan SPI terhadap topik tersebut agar pandangan SPI masuk dalam deklarasi. Cara anggota SPI mempertahankan argumennya pun beragam; dari menceritakan praktik pertanian yang telah dilakukan, menyajikan bukti-bukti seperti foto/gambar, serta menggunakan informasi dan pengetahuan yang mereka dapatkan baik dari sesama petani ataupun karena mengikuti pelatihan internasional.

Setelah sidang komisi kecil selesai, sidang pleno dilaksanakan untuk menyajikan dokumen yang telah disusun sebelumnya oleh para pengurus nasional dan kemudian disajikan di depan seluruh peserta untuk memastikan bahwa isi deklarasi sudah mewakili kepentingan petani. Dalam sidang pleno ini, aktor paling utama adalah petani, sehingga keinginan-keinginan mereka harus masuk ke dalam deklarasi. Pada sesi ini, petani SPI mencoba memasukkan konsep-konsep yang berhubungan dengan pandangan SPI, seperti: “keluarga petani”, “petani mandiri tidak boleh didiskriminasi”, serta “petani mempunyai posisi tawar lebih tinggi dibanding perusahaan”.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari pertemuan publik, *frame* kedaulatan pangannya sama dengan pertemuan internal yaitu penyebaran pandangan SPI terkait posisi mereka terhadap kebijakan pemerintah dan perusahaan. Hanya saja, pertemuan publik memiliki fungsi yang berbeda, yaitu: (1) arena pertemuan petani dengan *stakeholder* pertanian; (2) arena untuk menyatakan dan mempertahankan sikap serta posisi SPI kepada para *stakeholder* pertanian; dan (3) arena untuk mempromosikan aksi-aksi pada level lokal, nasional, maupun internasional yang telah dilakukan oleh SPI.

Praktik Komunikasi Level Global

Pada level global, acara dibuka dengan apa yang disebut '*Mistica*' yang menjadi kekhasan dari pertemuan pada level global. *Mistica* adalah sebuah upacara pertunjukkan melalui simbol-simbol seperti tari-tarian, teatrikal, atau musik yang menekankan pada kearifan lokal dan suara petani (Rosset, Patel, & Courville, 2006). Setiap hari, setiap wilayah akan melakukan *Mistica* sebelum kegiatan dimulai. Dalam pertemuan global ini, *Mistica* dilakukan oleh wilayah Eropa, Afrika, Asia, Afrika, dan Amerika. Setiap wilayah akan mempertontonkan berbagai bentuk kearifan lokalnya. Suasana saat *mistica* ini biasanya dimulai dengan suasana hushyuk namun diakhiri dengan meriah dimana setiap peserta akan ikut bersorak, menyanyi, ataupun menari. Tujuan dari adanya *mistica* adalah bentuk penghargaan terhadap keberagaman identitas petani dan kearifan lokal dari berbagai negara. Salah satu isu yang disepakati dari kearifan lokal pertanian dari berbagai negara adalah praktiknya yang serupa dengan prinsip-prinsip pertanian alami. Melalui *mistica*, anggota LVC mengetahui bahwa petani bersama-sama berjuang untuk mencapai kedaulatan pangan dengan menggunakan cara bertani yang khas daerahnya dibanding menggunakan prinsip-prinsip pertanian industri yang menyeragamkan cara bertani.

Setelah *mistica* dilakukan, acara kemudian akan berlanjut pada presentasi. Format presentasi dalam pertemuan global biasanya memberikan ruang bagi perwakilan dari setiap wilayah untuk berbicara sesuai dengan topik yang ditentukan. Topiknya mengenai: sejarah perjuangan, keberhasilan, analisis konteks politik internasional, apa yang harus diperjuangkan dan menjadi ancaman saat ini, modal yang dimiliki LVC dalam berjuang, aksi solidaritas, dan kemudian pertemuan dipisahkan secara tematik, yaitu isu petani muda dan perempuan. Tujuan dari presentasi per wilayah ini dilakukan untuk mendaftarkan masalah-masalah yang ditemui oleh anggota di wilayah masing-masing.

Setelah presentasi per wilayah, ada sesi khusus yaitu aksi solidaritas. Dalam sesi ini, LVC akan menyatakan aksi solidaritas terhadap anggota-anggota dari setiap negara yang sedang mengalami musibah, baik bencana alam ataupun akibat perang, opresi negara, dll. Aksi solidaritas ini membuat para anggota yang memiliki masalah merasa didengarkan dan didukung oleh anggota LVC lainnya.

Acara berikutnya adalah diskusi isi deklarasi yang dilaksanakan serupa dengan sidang pleno di pertemuan publik pada level nasional. Dokumen yang sudah disusun akan ditampilkan kemudian direvisi oleh peserta agar deklarasi tersebut disetujui. Inti dari isi deklarasi sebelum dipresentasikan sudah dilaporkan dalam presentasi per wilayah yang telah dijadwalkan sebelumnya, sehingga isinya merepresentasikan kepentingan anggota dari setiap wilayah.

Pertemuan pada level global biasanya diakhiri dengan adanya aksi turun ke jalan dan *field visit*. Pada aksi turun jalan, kegiatan diisi dengan simbol-simbol untuk merepresentasikan identitas petani, seperti simbol-simbol organisasi (syal, baju, topi, dan bendera organisasi) serta spanduk-spanduk yang menuliskan pandangan-pandangan LVC. Untuk kegiatan *field visit*, anggota biasanya akan melihat langsung praktik pertanian setempat

dan setiap negara akan saling berbagi mengenai praktik pertanian di daerahnya masing-masing. Serupa dengan *mistica*, tujuan dari *field visit* adalah menghargai keberagaman cara dalam bertani.

Dapat disimpulkan bahwa fungsi dari pertemuan level global adalah: (1) membangkitkan solidaritas dan (2) identifikasi masalah bersama; yang dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti *mistica*, aksi turun jalan, aksi solidaritas, serta *field visit*, sedangkan *frame* kedaulatan pangan pada level global ditekankan pada keberagaman identitas petani sebagai bentuk perjuangan dalam melawan kapitalisme.

Komunikasi Kedaulatan Pangan dalam LVC

Penjelasan sebelumnya telah mengemukakan bahwa: (1) setiap level memiliki fungsinya masing-masing dalam mengkomunikasikan kedaulatan pangan dan (2) setiap level memiliki *framena* sendiri dalam mendefinisikan kedaulatan pangan (Gambar 1). Perbedaan *frame* ini, uniknya, dapat terwakili dalam *masterframe* kedaulatan pangan pada level global. Dari setiap fungsi dan *frame* yang berbeda ini, ada satu hal kesamaan yang ditemukan yaitu mengkomunikasikan pandangan atau sikap SPI mengenai kedaulatan pangan. Komunikasi tidak hanya difokuskan pada pelatihan praktik pertanian atau aksi demonstrasi saja, tetapi dititikberatkan pada penanaman pandangan mengenai kedaulatan pangan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Seminar *et al.* (2017), dimana penanaman pandangan atau sikap menjadi hal yang penting untuk dikomunikasikan agar petani memiliki alasan untuk melakukan pertanian alami.

Dalam teori *Communication as Constitutive of Organization* (CCO) dari *Montreal School* (Ashcraft, Kuhn, & Cooren, 2009; Cooren, Kuhn, Cornelissen, & Clark, 2011; Koschmann, 2012; Taylor & Cooren, 1997), menjelaskan bahwa ada 4 tahap siklus pembangunan *masterframe*, yaitu: tahap 1, diskusi antara anggota dalam membangun

frame kedaulatan pangan; tahap 2, proses abstraksi atau usaha penggabungan setiap *frame* menjadi *masterframe* kedaulatan pangan; tahap 3, proses *distanciation* atau semakin jauhnya *masterframe* dari diskusi yang dihasilkan pada tahap 1. Hal ini terjadi karena abstraksi yang dilakukan untuk membuat *masterframe* yang mewakili setiap diskusi pada tahap 1; dan tahap 4, proses *one-to-many* atau proses dimana anggota akan menggunakan *masterframe* sesuai dengan kepentingannya masing-masing dan akan menjadi *frame* baru (Brummans, Cooren, Robichaud, & Taylor, 2014).

Dalam penelitian ini, ditemukan temuan yang berbeda dari teori CCO yaitu pada tahap 2 dan 3. Proses abstraksi dan *distanciation* justru tidak terlihat dalam *masterframe* kedaulatan pangan dalam teks yang diproduksi LVC. Seluruh *frame* pada level lokal, nasional, dan regional terwakili dengan baik pada level global. Hal ini dapat terjadi karena: (1) rantai pertemuan dalam jaringan LVC dari setiap level yang terkoneksi dan adanya ruang diskusi tematik; (2) produksi teks LVC tidak hanya satu deklarasi saja, tetapi dibuat beberapa jenis deklarasi tematik; (3) penekanan konsep LVC sebagai arena bersuara bagi petani. Konsep ini adalah salah satu ciri khas yang ditemukan dari organisasi gerakan sosial dan JAT, dimana dalam kasus ini petani adalah aktor utama dalam pembangunan *masterframe* kedaulatan pangan.

SIMPULAN

Praktik komunikasi LVC dalam mendefinisikan, menegosiasi, dan mempertahankan *masterframe* kedaulatan pangan dapat disimpulkan dalam empat poin, yaitu: (1) setiap level memiliki fungsi dan *framena* sendiri dalam membangun *masterframe* kedaulatan pangan; (2) penanaman pandangan atau sikap mengenai cara mencapai kedaulatan merupakan satu pesan yang penting dikomunikasikan; dan (3) isu-isu dari setiap

level direpresentasikan dengan baik dalam *masterframe* kedaulatan pangan.

Secara teoritis, ditemukan bahwa komunikasi dalam organisasi –dalam kasus ini JAT petani– melalui pertemuan-pertemuan yang sistematis dan pemberian suara kepada petani sebagai aktor utama dalam pembangunan *masterframe* kedaulatan pangan, isu-isu dari setiap level tidak ada yang hilang akibat proses abstraksi dan *distanciation*. Dalam ilmu Komunikasi untuk Perubahan Sosial, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa keberagaman tetap dapat diakomodir dalam membangun sebuah pemahaman atau kesepakatan bersama.

Saran praktis bagi pemerintah berkaitan erat dengan konsep kedaulatan pangan yang telah tertulis dalam UU No. 18/2012, maka untuk mencapai kedaulatan pangan, diperlukan perubahan cara komunikasi dari pemerintah kepada para petani. Selama ini penghubung antara pemerintah dengan petani adalah penyuluh yang lebih fokus pada pembinaan praktik pertanian, namun hal ini tidak cukup. Diperlukan penyuluhan mengenai pandangan atau sikap para petani untuk mencapai kedaulatan pangan. Pandangan ini tidak harus sama dengan cara-cara yang dilakukan oleh JAT, tetapi bisa memilih tema lain seperti perlindungan lingkungan.

Saran praktis bagi JAT adalah berkaitan dengan proses pembangunan *masterframe* yang harus fokus pada aktor utama yang ingin diberdayakan dalam JAT tersebut. Artinya, *power* dalam menentukan isi teks tetap dipegang oleh petani namun pengurus JAT baik pada level nasional dan global berperan untuk memastikan bahwa suara petani terepresentasikan dalam *masterframe* JAT.

DAFTAR PUSTAKA

Andrews, A. (2010a). Constructing mutuality: The Zapatistas' Transformation of Transnational Activist Power Dynamics. *Latin American Politics and Society*,

52(1), 89–120.
<https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2010.00075.x>

Andrews, A. (2010b). How Activists “Take Zapatismo Home”: South-to-North Dynamics in Transnational Social Movements. *Latin American Perspectives*, 38(1), 138–152.
<https://doi.org/10.1177/0094582X10384217>

Ashcraft, K. L., Kuhn, T. R., & Cooren, F. (2009). Constitutional Amendments: “Materializing” Organizational Communication. *The Academy of Management Annals*, 3(1), 1–64.
<https://doi.org/10.1080/19416520903047186>

Baletti, B., Johnson, T. M., & Wolford, W. (2008). “Late Mobilization”: Transnational peasant networks and grassroots organizing in Brazil and South Africa. *Journal of Agrarian Change*, 8(2–3), 290–314.
<https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2008.00171.x>

Binnie, J., & Klesse, C. (2012). Solidarities and tensions: Feminism and transnational LGBTQ politics in Poland. *European Journal of Women's Studies*, 19(4), 444–459.
<https://doi.org/10.1177/1350506812466610>

Borras, S. M. (2010). The Politics of Transnational Agrarian Movements. *Development and Change*, 41(5), 771–803.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2010.01661.x>

Boyer, J. (2010). Food security, food sovereignty, and local challenges for transnational agrarian movements: the Honduras case. *Journal of Peasant Studies*, 37(2), 319–351.
<https://doi.org/10.1080/03066151003594997>

Brochner, G. P. M. (2014). Peasant Women in Latin America : Transnational Networking for Food Sovereignty as an Empowerment Tool. *Latin American Policy*, 5(2), 251–264. Retrieved from <http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy2.apus.edu/doi/10.1111/lamp.12054/epdf>

Brummans, B. H. J. M., Cooren, F., Robichaud, D., & Taylor, J. R. (2014). Approaches to

- the Communicative Constitution of Organizations. In L. L. Putnam & D. K. Mumby (Eds.), *The SAGE Handbook of Organizational Communication: Advances in Theory, Research, and Methods* (Third Edit). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Caouette, D. (2007). Going transnational?: Dynamics and challenges of linking local claims to global advocacy networks in Southeast Asia. *Pacific Focus*, 22(2), 141–166. <https://doi.org/10.1111/j.1976-5118.2007.tb00300.x>
- Claeys, P. (2012). The Creation of New Rights by the Food Sovereignty Movement: The Challenge of Institutionalizing Subversion. *Sociology*, 46(5), 844–860. <https://doi.org/10.1177/0038038512451534>
- Cooren, F., Kuhn, T. R., Cornelissen, J. P., & Clark, T. (2011). Communication, organizing and organization: an overview and introduction to the special issue. *Organization Studies*, 32(9), 1149–1170. <https://doi.org/10.1177/0170840611410836>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Doherty, B., & Doyle, T. (2006). Beyond borders: Transnational politics, social movements and modern environmentalisms. *Environmental Politics*, 15(5), 697–712. <https://doi.org/10.1080/09644010600937132>
- Dunford, R. (2014). Human rights and collective emancipation: The politics of food sovereignty. *Review of International Studies*, 41(02), 239–261. <https://doi.org/10.1017/S0260210514000187>
- Edelman, M. (2014). Food sovereignty: forgotten genealogies and future regulatory challenges. *Journal of Peasant Studies*, 41(6), 1–20. <https://doi.org/10.1080/03066150.2013.876998>
- Fominaya, C. F. (2010). Creating Cohesion from Diversity: The Challenge of Collective Identity Formation in the Global Justice Movement. *Sociological Inquiry*, 80(3), 377–404. <https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.2010.00339.x>
- Friedman, E. (2009). External Pressure and Local Mobilization: Transnational Activism and the Emergence of the Chinese Labor Movement. *Mobilization: An International Journal*, 14(2), 121–199. <https://doi.org/10.17813/mai.q.14.2.328913653020k119>
- Hymes, D. (1967). The anthropology of Communication. In *Human Communication Theory: Original Essays* (pp. 1–39).
- Hymes, D. (1972). Toward Ethnographies of Communication. In P. P. Giglioli (Ed.), *Language and Social Context*. London: Penguin. https://doi.org/10.1525/aa.1964.66.suppl_3.02a00010
- Koohafkan, P., & Altieri, M. A. (2011). *Globally Important Agricultural Heritage Systems A Legacy for the Future*. Rome: Food and Agriculture Organizations. Retrieved from http://www.fao.org/fileadmin/templates/giahs/PDF/GIAHS_Booklet_EN_WEB2011.pdf
- Koschmann, M. A. (2012). The Communicative Constitution of Collective Identity in Interorganizational Collaboration. *Management Communication Quarterly*, 27(1), 61–89. <https://doi.org/10.1177/0893318912449314>
- Lerche, J. (2008). Transnational advocacy networks and affirmative action for Dalits in India. *Development and Change*, 39(2), 239–261. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.2007.00478.x>
- Levitt, P., & Merry, S. (2009). Vernacularization on the ground: Local uses of global women’s rights in Peru, China, India and the United States. *Global Networks*, 9(4), 441–461. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2009.00263.x>
- Lindell, I. (2009). “Glocal” movements: Place struggles and transnational organizing by informal workers. *Geografiska Annaler, Series B: Human Geography*, 91(2), 123–136. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0467.2009.00310.x>

- LVC. (2009). La Via Campesina: The International Peasant's Voice. Retrieved December 2, 2016, from <https://viacampesina.org/en/index.php/main-issues-mainmenu-27>
- Marcus, G. E. (1995). Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography. *Annual Review of Anthropology*, 24, 95–117.
- McKeon, N. (2013). 'One Does Not Sell the Land Upon Which the People Walk': Land Grabbing, Transnational Rural Social Movements, and Global Governance. *Globalizations*, 10(1), 105–122. <https://doi.org/10.1080/14747731.2013.760911>
- McMichael, P. (2014). Historicizing food sovereignty. *Journal of Peasant Studies*, 41, 1–25. <https://doi.org/10.1080/03066150.2013.876999>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Editio). London: SAGE Publications.
- Peluso, N. L., Afiff, S., & Rachman, N. F. (2008). Claiming the grounds for reform: Agrarian and environmental movements in Indonesia. *Journal of Agrarian Change*, 8(2–3), 377–407. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0366.2008.00174.x>
- Purwanto, H. (2012). *Serikat Petani Indonesia dalam Perjuangan Pembaruan Agraria Periode 1998-2011*. Universitas Indonesia.
- Pye, O. (2010). The biofuel connection – transnational activism and the palm oil boom. *Journal of Peasant Studies*, 37(4), 851–874. <https://doi.org/10.1080/03066150.2010.512461>
- Richards, L. (1999). Data Alive! The Thinking Behind NVivo. *Qualitative Health Research*, 9(3), 412–428. <https://doi.org/10.1177/104973239900900310>
- Rosset, P. M., Patel, R., & Courville, M. (2006). *Promised Land: Competing Visions of Agrarian Reform*. New York: Food First Books.
- Saville-Troike, M. (2008). The Ethnography of Communication: An Introduction: Third Edition. In *The Ethnography of Communication: An Introduction* (3rd ed.). Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1002/9780470758373>
- Seminar, A. U., Sarwoprasodjo, S., Santosa, D. A., & Kinseng, R. A. (2017). Agroecological Education Aimed at Achieving Food Sovereignty. *Journal of Developments in Sustainable Agriculture*, 12(1), 34–44.
- Shawki, N. (2013). Understanding the Transnational Diffusion of Social Movements: An Analysis of the U.S. Solidarity Economy Network and Transition US. *Humanity & Society*, 37(2), 131–158. <https://doi.org/10.1177/0160597613481799>
- Swerts, T. (2013). The democratic deficit of transnational environmental activism: A case study of e-waste governance in India. *Global Networks*, 13(4), 498–516. <https://doi.org/10.1111/glob.12009>
- Taylor, J. R., & Cooren, F. (1997). What makes communication 'organizational'? *Journal of Pragmatics*, 27(4), 409–438. [https://doi.org/10.1016/S0378-2166\(96\)00044-6](https://doi.org/10.1016/S0378-2166(96)00044-6)
- Yin, R. K. (2003). Case Study Research Design and Methods. In *SAGE Publications* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications. <https://doi.org/10.1097/FCH.0b013e31822dda9e>